

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Cet.1.* Jakarta, Raih asa sukses, 2015.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, cet.1.* Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad . *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Penerbit Pustaka Pelajar, 2018.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cet.1.* Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.5.* Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2010.
- Rahayu Hartini, *Aspek Hukum Bisnis, Cet.7.* Malang: Citra Mentari, 2004.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik, Cet.2.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Purnomo, Hariyani, Citra Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi, Cet.1.* Yogyakarta, Jogja Bangkit Publisher, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet.21.* Jakarta: Intermasa, 2005.
- Titi Hendrawati, *BAPPEBTI Tetap Prioritaskan Perhatian Pada Perlindungan Nasabah,* Jakarta, Business New, 2005.

### Disertasi

- Rosa Agustina Pangaribuan, *"Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Hukum,"* Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Buana Press, 2014).

Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka. Keppres Nomor 119 Tahun 2001.

Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999.

Tentang Perdagangan Berjangka. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997.

Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

## **Putusan**

PT Jalatama Artha Berjangka v. Yuhelmi, S. Sos., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. Nomor 339/PDT/2018/PT.DKI.